



LAPORAN PENELITIAN

**Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan
Hutan Desa**

**Kampung Lakan Bilem
Kecamatan Nyuatan
Kabupaten Kutai Barat**

2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	0
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
I. PENDAHULUAN	3
a. Latar Belakang.....	3
b. Rumusan Masalah	4
c. Tujuan Penelitian	5
d. Hasil yang diharapkan.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
a. Teori Partisipasi Pengelolaan Hutan	6
b. Perempuan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	7
c. Perempuan Dan Gender Dalam Wacana Program Pembangunan	7
d. Perempuan Dan Perhutanan Sosial (Penelitian Terdahulu)	8
e. Pengarusutamaan Gender dalam Perhutanan Sosial.....	8
III. METODE PENELITIAN	10
a. Waktu dan Tempat.....	10
b. Jenis Penelitian.....	10
c. Metode Pengambilan Data	11
1. Desk Research/Studi Dokumen	11
2. In-Depth Semi Structured Interviews.....	11
3. Observasi	12
IV. HASIL PENELITIAN.....	13
Hasil temuan utama:.....	13
Pembahasan:	13
a. Keterlibatan Perempuan dalam Program Perhutanan Sosial Kampung Lakan Bilem.....	13
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Perempuan Kampung Lakan Bilem	16
c. Rekomendasi bagi pemangku kepentingan	18
V. KESIMPULAN	20
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan.....	6
Tabel 2. Jadwal Penelitian.....	10
Tabel 3. Daftar Informan.....	12

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Kelompok perempuan menjadi kelompok masyarakat yang rentan terhadap keterbatasan dalam partisipasi. Dalam konteks pengelolaan hutan, tingkat partisipasi perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki. Padahal, perempuan mampu berkontribusi besar bagi pendapatan dan penghidupan rumah tangga ketika mereka mengoptimalkan manfaat dari hasil hutan (Sunderland et al, 2014).

Data Union for Conservation of Nature (IUCN) tahun 2021 menunjukkan 43 persen perempuan di negara berkembang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan kehutanan. Data tersebut memperkirakan, bahwa ketika perempuan diberi ruang yang adil dalam hal partisipasi dan akses terhadap sumber daya produktif, akan mampu berkontribusi dalam peningkatan hasil sebesar 2,5 hingga 4 persen. Tidak hanya itu, keterlibatan perempuan dalam proses produksi pertanian maupun kehutanan, juga berdampak pada menurunnya angka kelaparan dunia mencapai 12 hingga 17 persen (Gina, 2022).

Sebagai upaya mengatasi kesenjangan partisipasi perempuan, pemerintah memiliki instrumen kebijakan berupa Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG merupakan strategi untuk mencapai keadilan gender melalui program, kegiatan, ataupun kebijakan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. Program PUG dikemas dalam berbagai kegiatan yang menyangkut peningkatan pengetahuan dan kesadaran, partisipasi perempuan dalam politik, pengambilan keputusan, serta kepemimpinan (Hartono dan Khalwani, 2022).

Jika dikaitkan antara program Perhutanan Sosial (PS) dengan PUG, penelitian dari Desmiwati (2016) menunjukkan bahwa PUG dalam Program Perhutanan Sosial belum terwujud meskipun telah ada aturan dan panduan untuk merumuskan evaluasi program responsif gender, data terpilah, struktur kelompok kerja dan pelatihan. Beberapa faktor penyebab PUG belum berjalan efektif karena pemahaman konsep PUG yang kurang memadai, kebuntuan kelompok kerja untuk mobilisasi dan mengelola pengetahuan PS atas PUG ke dalam jaringan yang efektif, tidak tersedianya data terpilah serta sistem monitoring dan evaluasi sebagai basis untuk melihat ketidakadilan gender di sektor kehutanan.

Dalam rangka mendorong efektivitas PUG serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam program PS, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru terkait PS, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. Melalui peraturan tersebut, terdapat beberapa pasal yang mengedepankan aspek keadilan gender. Misalnya melalui Pasal 107 ayat 3 dijelaskan bahwa penyusunan rencana PS disusun dengan memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar dan aspek pengarusutamaan gender, serta mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang.

Kampung Lakan Bilem merupakan salah satu desa dampingan Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) yang telah memiliki izin PS dengan skema Hutan sejak tahun 2018. Dalam partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa, Kampung Lakan Bilem telah berupaya mengakomodir partisipasi perempuan, dengan melibatkan perempuan dalam kepengurusan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Selain itu juga terdapat Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) perempuan. Namun, KUPS yang terbentuk bukan merupakan inisiasi kelompok perempuan itu sendiri. Keberlanjutan KUPS perempuan ini pun masih memerlukan banyak dukungan dalam berbagai hal termasuk peningkatan kapasitas perempuan itu sendiri.

Pengalaman perempuan dalam pengelolaan PS di Kampung Lakan Bilem masih perlu terus diakomodir, baik itu pada tata kelola kawasan, usaha, maupun kelembagaan. Mengingat pula, banyak masyarakat termasuk perempuan di Kampung Lakan Bilem, yang menggantungkan hidupnya pada akses dan pengelolaan Hutan Desa.

Berdasarkan data dan fakta di atas, KBCF akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa Kampung Lakan Bilem. Melalui penelitian ini, KBCF berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi stakeholder terkait untuk mendukung dan mendorong tercapainya keadilan gender melalui integrasi pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian masalah perempuan dan laki-laki dalam Perhutanan Sosial.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana tingkat partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa di Kampung Lakan Bilem, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa di Kampung Lakan Bilem, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat?
3. Apa rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa di Kampung Lakan Bilem, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat?

c. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis tingkat partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa di Kampung Lakan Bilem, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa di Kampung Lakan Bilem, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat
3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan desa setempat untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa di Kampung Lakan Bilem, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat

d. Hasil yang diharapkan

1. Terpetakannya tingkat partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa di Kampung Lakan Bilem, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat.
2. Terpetakannya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa di Kampung Lakan Bilem, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat
3. Rekomendasi kepada pemerintah daerah dan desa untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa di Kampung Lakan Bilem, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat

II. TINJAUAN PUSTAKA

a. Teori Partisipasi Pengelolaan Hutan

Agarwal (2001) dalam penelitiannya mengenai pengelolaan hutan berbasis masyarakat, menggunakan teori tipologi partisipasi untuk melihat sejauh mana partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan. Pada teori ini, diterangkan mengenai partisipasi sebagai sebuah spektrum, mulai dari hanya menjadi anggota kelompok, tanpa terlibat dalam apapun, sampai partisipasi paling aktif, di mana anggota kelompok mampu menyampaikan pandangannya dan turut mempengaruhi pengambilan keputusan. Perbedaan tingkat partisipasi individu atau kelompok ditentukan oleh aturan, norma, persepsi, serta keunggulan dan atribut pihak tersebut (Agarwal, 2001)

Tabel 1. Tingkat Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan

Tingkat Partisipasi	Karakteristik Partisipasi
Partisipasi nominal	Keanggotaan dalam kelompok
Partisipasi pasif	Anggota mengetahui hasil keputusan setelah keputusan diambil (ex post facto); atau menghadiri pertemuan dan mendengarkan pengambilan keputusan, tetapi tidak menyuarakan pendapatnya
Partisipasi konsultatif	Diminta untuk memberikan pendapat terkait hal-hal tertentu tanpa jaminan bahwa mereka dapat mempengaruhi keputusan
Partisipasi dalam kegiatan tertentu	Diminta untuk (atau secara sukarela) melakukan tugas tertentu
Partisipasi aktif	Menyampaikan pendapat, baik diminta atau tidak diminta, atau mengambil inisiatif lainnya
Partisipasi interaktif	Memiliki suara dan pengaruh dalam pengambilan keputusan kelompok; memegang jabatan/wewenang

Sumber: Agarwal, 2001

Dalam proses pengkajian dinamika partisipasi, Agarwal (2001) menjelaskan mengenai enam faktor yang dapat membentuk partisipasi. Faktor-faktor penentu partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan antara lain, aturan keanggotaan untuk menentukan sistem anggota dalam kelompok pengelola hutan; norma sosial terkait partisipasi; persepsi sosial tentang kemampuan

perempuan berkontribusi dalam pengelolaan hutan; klaim dan kontrol laki-laki yang sudah mengakar dalam struktur masyarakat; keunggulan dan atribut pribadi, serta keunggulan dan atribut rumah tangga.

b. Perempuan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Manusia di dalam kehidupannya tidak lepas dari hasil alam untuk kebutuhan sehari-hari, seperti air, keanekaragaman hayati, lahan dan ekosistem. Hal tersebut agar manusia dapat memenuhi keberlangsungan hidup dan terhindar dari kemiskinan. Jika berbicara lingkungan dan perubahannya, salah satu kelompok yang menerima dampak terbesar adalah perempuan. Hal ini karena isu pembangunan secara umum, maupun politik, mengakibatkan dampak luas dan hampir mempengaruhi semua sektor kehidupan. Perempuan mengalami kondisi ketidakadilan karena perbedaan gender. Padahal sejarah awal manusia, perempuan pada dasarnya telah memberi kontribusi pada pengelolaan sumberdaya alam (Saleh, 2014).

Dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam, Perempuan berperan mulai dari pengelolaan tanaman, lahan pertanian, hingga merawat binatang dan hutan. Perempuan mempunyai kontribusi dan hal waktu, keterampilan, dan visi pribadi untuk keluarga dan pembangunan masyarakat. Kelompok perempuan dan individu di lingkungan, memiliki keberanian, komitmen, ketahanan dan kesabaran (Saleh, 2014). Pembangunan di Indonesia terkait lingkungan berkelanjutan, tergantung bagaimana cara pengelolaan sumberdaya alam. Kerusakan yang terjadi tidak lepas dari skema pengelolaan pembangunan di Indonesia yang direplikasikan dalam bentuk kebijakan pengelolaan sumberdaya alam (Arief dalam Saleh, 2014).

c. Perempuan Dan Gender Dalam Wacana Program Pembangunan

Rendahnya keterwakilan perempuan secara kuantitatif dalam lembaga politik formal, mendorong perempuan untuk diberikan ruang untuk berpartisipasi. Peran yang dikerjakan oleh perempuan dalam keikutsertaan di bidang pembangunan merupakan aksi dalam rangka mengangkat derajat dan kualitas perempuan (Angelia E, 2017).

Berkaitan dengan pengalihan sumber daya ekonomi yang dimiliki rumah tangga miskin, telah menuntut wanita sebagai istri untuk dapat menopang ketahanan ekonomi keluarga. Kondisi demikian merupakan dorongan yang kuat bagi wanita untuk bekerja di luar rumah. Tren yang terjadi saat ini, keterlibatan wanita pada sektor publik menunjukkan angka yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi wanita untuk bekerja di sektor publik semakin tinggi (Haryanto, 2008).

d. Perempuan Dan Perhutanan Sosial (Penelitian Terdahulu)

Penelitian yang mengaitkan antara perempuan dan Perhutanan Sosial juga telah dilakukan oleh Sukma Taroniarta & Nurul Huda Yahya (2022) dengan judul “Perempuan Pejuang Sutra di Kabupaten Wajo: Aktor Tunggal dan Tantangan Akses Program Perhutanan Sosial”. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa Perhutanan Sosial melalui skema peningkatan usaha hasil hutan bukan kayu di lahan rakyat memberikan peluang dan akses pengelolaan kepada para pegiat sutra yang kini didominasi oleh para perempuan. Secara sosial budaya, peran perempuan dalam industri sutra telah lama ada dan semakin kuat akibat terjadinya diversifikasi mata pencaharian.

Meski demikian, penelitian dari Taroniarta & Yahya (2022) memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi menjadi faktor terjadinya pergeseran-peralihan peran dalam usaha sutra, serta beberapa kendala yang mengancam keberlanjutan usaha sutra yang telah bertahan selama ratusan tahun.

Terkait partisipasi perempuan dalam Program Perhutanan Sosial, terdapat penelitian dari Abby Gina Boang Manalu, Nur Iman Subono & Retno Daru Dewi G.S. Putri (2022), dengan judul “Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi”. Secara umum, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bagaimana hambatan kultural keterlibatan perempuan berdampak terhadap bentuk dan praktik baik dari partisipasi perempuan.

e. Pengarusutamaan Gender dalam Perhutanan Sosial

Guna mengatasi kesenjangan gender dalam pembangunan, pemerintah telah mengatur regulasi berupa Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mewujudkan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang kehidupan, mulai dari tahap perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No.9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, juga secara eksplisit telah memberikan perhatian pada masalah gender dalam pengelolaan PS. Beberapa pasal terkait isu gender, diantaranya: (1) Pasal 90 tentang pemegang persetujuan pengelolaan HD, HKm, dan HTR, berhak mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya; (2) Pasal 107 ayat 3 disebutkan rencana pengelolaan PS disusun dengan memperhatikan kearifan lokal,

potensi hutan, peluang pasar dan aspek pengarusutamaan gender serta mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang; (3) Pasal 189 ayat 4 menyebutkan kesetaraan gender menjadi salah satu aspek sosial yang diperhatikan dalam evaluasi kegiatan pengelolaan perhutanan sosial.

III. METODE PENELITIAN

a. Waktu dan Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November 2023 berlokasi di Kampung Lakan Bilem, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				
		Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Penyusunan Proposal riset					
2	Mendiskusikan proposal dan rencana riset					
3	Pelaksanaan riset					
4	Mengolah data					
5	Menyusun hasil riset					

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data kualitatif diperoleh dengan *desk research*, *in-depth semi-structured interview*, dan observasi. *Desk research* dilakukan dengan mencari literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Beberapa sumber informasi yang digunakan antara lain kebijakan (peraturan perundang-undangan), buku, jurnal, berita, dan laporan. *Desk research* akan dilakukan sebelum dan setelah proses pengambilan data di lapangan.

Studi ini menggunakan tipologi partisipasi Agarwal (2001) yang mengacu pada penelitiannya yang ekstensif tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Agarwal menjabarkan partisipasi sebagai sebuah spektrum: mulai dari hanya menjadi anggota kelompok, tanpa terlibat dalam apapun, sampai partisipasi paling aktif di mana anggota menyampaikan pandangannya dan turut memengaruhi pengambilan keputusan. Perbedaan tingkat partisipasi individu atau kelompok ditentukan oleh aturan, norma,

persepsi, serta keunggulan (endowment), dan atribut (attributes) pihak tersebut (Agarwal 2001). Kami menggunakan tipologi ini untuk melakukan analisis, memahami situasi partisipasi di lokasi penelitian, serta menarik kesimpulan.

c. Metode Pengambilan Data

1. Desk Research/Studi Dokumen

Studi dokumen (*desk research*) adalah nama lain dari *secondary research* (riset data sekunder) (Travis, 2016). Dalam proses penelitian, terdapat dua jenis proses pengambilan data, yakni pengambilan data secara primer (*primary research*) dan sekunder (*secondary research*). Pengambilan data secara primer maksudnya adalah peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Sementara, pengambilan data sekunder adalah peneliti melakukan mengambil data dari hasil penelitian orang lain melalui berbagai sumber seperti jurnal, artikel dalam media, dan lain-lain. *Desk research* dilakukan agar peneliti mengetahui perkembangan konteks isu/masalah penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dari hasil temuan di lapangan.

Dalam penelitian ini, *desk research* dilakukan dengan mencari dan memetakan berbagai referensi yang berkaitan dengan Perhutanan Sosial, terutama tentang partisipasi, khususnya partisipasi perempuan dalam Perhutanan Sosial dan implementasi kebijakan terkait dengan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Temuan dari *desk research* selanjutnya digunakan untuk menjadi landasan dalam memahami konteks permasalahan yang ada di lapangan, juga untuk membangun pertanyaan penelitian yang relevan dan menjadi dasar dalam melakukan observasi maupun panduan wawancara mendalam, untuk menjawab masalah dan tujuan penelitian ini.

2. In-Depth Semi Structured Interviews

Pengumpulan informasi juga dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam ini dilakukan dengan informan kunci. Informan dapat berasal dari pemangku kepentingan, antara lain ketua LPHD Kampung Lakan Bilem, Kepala Desa setempat, beberapa anggota perempuan dari KPS/KUPS, maupun pejabat daerah setempat yang terkait dengan kebijakan Perhutanan Sosial. Informan akan menyampaikan keadaan dirinya, pandangan, atau pemikirannya tentang masyarakat dan lingkungannya khususnya terkait peran

perempuan terhadap pengelolaan sumber daya hutan. Dalam memilih informan kunci, peneliti juga akan mempertimbangkan aspek inklusivitas gender.

Proses wawancara dilakukan dengan fleksibel. Peneliti dan juga informan memiliki kebebasan untuk bertanya dan meminta klarifikasi lebih lanjut atas informasi yang telah diberikan. Peneliti juga memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi pertanyaan baru yang tidak dipertimbangkan kemunculannya (Berg, Corbetta, Griffie, dan Ryan et al., dalam Shamir et al., 2019). Selain itu, peneliti juga memiliki kebebasan untuk memvariasikan urutan pertanyaan, tergantung pada arah wawancara. Hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan gaya percakapan dan membuat proses wawancara menjadi nyaman. Langkah tersebut boleh dilakukan selama proses wawancara masih berfokus pada data yang ingin digali.

Tabel 3. Daftar Informan

Informan	Jumlah
Petinggi Kampung Lakan Bilem	1
Ketua LPHD	1
Kepala Adat Lakan Bilem	1
Pendamping CSO	1
Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1
Ketua PKK	1
Ketua KUPS Wisata	1
Ketua KUPS Gula Aren	1
Perempuan anggota LPHD	1
Perempuan anggota KUPS wisata	1
Perempuan anggota KUPS Gula Aren	1
Total	11 orang

3. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti. Dalam konteks penelitian ini, maka observasi akan dilakukan pada aktivitas perempuan yang tergabung dalam LPHD dan KUPS di Kampung Lakan Bilem.

IV. HASIL PENELITIAN

Hasil temuan utama:

Mayoritas perempuan dalam studi ini memiliki tingkat partisipasi yang cenderung masuk dalam kelompok partisipasi konsultatif. Menurut Agarwal (2001), partisipasi konsultatif memiliki ciri partisipasi yakni apabila dalam suatu pertemuan atau kegiatan tertentu, kelompok perempuan diminta untuk memberikan pendapat terkait hal-hal tertentu tanpa jaminan bahwa pendapat mereka dapat mempengaruhi keputusan.

Perempuan Kampung Lakan Bilem cenderung lebih banyak berkecukupan dan memegang urusan domestik. Sementara ranah pengelolaan Hutan Desa lebih banyak melibatkan laki-laki. Beberapa perempuan yang dipilih untuk menjadi perwakilan desa biasanya memiliki privilege berupa kedekatan dengan pejabat desa atau menjabat sebagai anggota di petinggi Kampung.

Pada pengelolaan Hutan Desa, utamanya kegiatan di dalam hutan, mayoritas keterlibatan didominasi oleh kelompok laki-laki. Sebagian perempuan yang hadir, terlibat dalam urusan administrasi seperti menyiapkan absensi, maupun menyediakan konsumsi. Secara partisipasi nominal (keterlibatan dalam Surat Keputusan (SK) pengurus), baik LPHD maupun KUPS, kelompok perempuan telah diupayakan keterlibatannya. Hal tersebut tercermin dari terbentuknya KUPS perempuan yang membidangi sektor wisata. Namun demikian, perlu terus diupayakan agar keterlibatan perempuan mencapai kategori aktif, hingga interaktif.

Meskipun keterlibatan perempuan pada pengelolaan Hutan Desa cenderung belum optimal, tetapi studi ini menemukan bahwa perempuan juga turut andil mengelola hutan dengan kerja-kerja khas perempuan. Perempuan juga telah didorong partisipasinya dengan pembentukan KUPS yang berisikan kelompok perempuan, serta dilibatkan dalam berbagai pelatihan untuk menambah kapasitas dalam pengelolaan Hutan Desa.

Pembahasan:

Dalam melihat bagaimana tingkat partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa di Kampung Lakan Bilem, terdapat tiga bagian yang akan dibahas, yakni keterlibatan perempuan dalam program Perhutanan Sosial di Kampung Lakan Bilem, partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa Lakan Bilem, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa Lakan Bilem.

a. Keterlibatan Perempuan dalam Program Perhutanan Sosial Kampung Lakan Bilem

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, studi ini menunjukkan bahwa esensi dari program Perhutanan Sosial dapat dikatakan baik dan dirasakan oleh masyarakat Kampung Lakan Bilem, termasuk perempuan. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Moja, mantan petinggi Kampung Lakan Bilem, yang menyebutkan bahwa program Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa sedari awal memang diharapkan keberadaannya. Dengan adanya akses legal tersebut, masyarakat mendapat kepastian hukum dalam berkegiatan di dalam dan sekitar Hutan Desa. Selain itu, Hutan Desa Lakan Bilem juga dapat berfokus pada perlindungan hutan sebagai sumber mata air, pengurangan emisi karbon, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

“Dulu memang masyarakat yang minta supaya hutan Lakan Bilem ini dijadikan Hutan Desa...”
(Wawancara dengan Yosianus Moja, pada 16 November 2023)

Berdasarkan informasi yang diperoleh, akses untuk menuju Hutan Desa tergolong jauh, sehingga frekuensi masyarakat untuk masuk ke dalam hutan sangat jarang. Dapat dikatakan, belum ada aktivitas/ kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat di dalam Hutan Desa. Aktivitas di dalam hutan biasanya adalah berburu dan melakukan patroli rutin. Sementara di sekitar Hutan Desa, masyarakat melakukan aktivitas berkebun dan beternak.

Bagi perempuan kampung Lakan Bilem, terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan di sekitar Hutan Desa. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Rusmini. Ibu Rusmini merupakan salah seorang pembuat bedak dingin khas masyarakat Dayak. Bedak dingin tersebut biasanya dimanfaatkan sebagian besar wanita di Kampung Lakan Bilem sebagai perawatan kulit wajah alami. Unikny, bahan yang digunakan berasal dari tumbuhan yang berada di sekitar Hutan Desa, yakni kulit pohon belaband dan banggeris, serta tumbuhan atsiri sebagai bahan wewangian. Biasanya, Ibu Rusmini beserta beberapa perempuan lainnya mengambil sendiri bahan tersebut ke sekitar Hutan Desa.

Aktivitas membuat bedak dingin merupakan bagian dari budaya perempuan Lakan Bilem. Meskipun demikian, terdapat tantangan bagi perempuan untuk mengakses manfaat dari Program Perhutanan Sosial. Menurut Rusmini, anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), partisipasi perempuan dalam setiap program Perhutanan Sosial belum optimal. Seringkali, perempuan hanya tercatat namanya dalam Surat Keputusan lembaga, namun jarang diikutsertakan dalam kegiatan di dalamnya. Rusmini berpendapat, permasalahan utama yakni, informasi terkait rapat, kegiatan dan sebagainya tidak tersebar secara merata.

“Padahal jika diberitahu jauh-jauh hari kalau ada rapat dan sebagainya, kami (perempuan) mau untuk datang...” (wawancara dengan Rusmini, pada 16 November 2023)

Upaya untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam Perhutanan Sosial juga telah dilakukan. Salah satunya dengan pembentukan kelompok usaha Perhutanan Sosial (KUPS) wisata yang keseluruhan anggotanya merupakan perempuan. Sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Agarwal (2001), aturan soal keanggotaan dalam kelompok pengelola hutan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam mengelola hutan.

Lebih jauh, untuk terdaftar sebagai anggota dalam Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), hanya diperkenankan mengajukan satu nama dari setiap Kartu Keluarga (KK). Akibatnya, perempuan kerap kali tidak dimasukkan ke dalam daftar calon penerima SK Perhutanan Sosial, karena pada umumnya, nama yang dimasukkan adalah Kepala Keluarga.

Sebenarnya, prosedur yang tercantum dalam pembentukan kelembagaan pada “Buku Saku Fasilitas Permohonan Hutan Kemasyarakatan” (2021) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, KLHK, diterangkan bahwa “*Untuk satu keluarga diwakili oleh satu orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan*”. Dapat diartikan, secara kelembagaan, KLHK sebagai pembuat kebijakan telah berupaya menerapkan prinsip pengarusutamaan gender (PUG) dalam Perhutanan Sosial.

Untuk mendorong keterlibatan perempuan yang lebih bermakna dalam Perhutanan Sosial, peran pendamping yang memiliki perspektif gender sangat penting. Dengan begitu, perempuan dapat menerima informasi yang adil terkait akses sumber daya hutan. Sebagaimana disampaikan pendamping CSO Lakan Bilem Wahyu Salehudin Hamzah,

“...Bimtek sudah pernah dilakukan beberapa kali dan melibatkan perempuan. Perempuan aktif mengusulkan pendapat. Bentuk partisipasinya berupa ide/gagasan. Saat itu kan bimbingan teknisnya terkait penguatan kelembagaan. Nah disitu banyak muncul ide-ide terkait kelompok usaha bidang wisata yang sedang dijalankan. Tapi sebenarnya, di dalam forum, aktif atau tidaknya peserta (perempuan) kan tergantung pembawaan dan metode narasumber yang interaktif dengan peserta. Kadang pendapat mereka tidak dengan langsung berbicara, tapi narasumber meminta lewat tulisan. Memang di bilem ini, perempuan masih mengurus konsumsi administrasi dan sebagainya. Tapi mereka juga hadir di banyak kegiatan kampung,

contohnya musrembang. Waktu menyusun RPJMDes, perempuan juga aktif mengajukan aspirasi untuk kemajuan kampung...” (Wawancara dengan Wahyu Salehudin Hamzah, pada 16 November 2023)

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Perempuan Kampung Lakan Bilem

Untuk mendorong partisipasi perempuan yang lebih bermakna dalam PS, peran stakeholder serta pendamping di tingkat daerah hingga tapak, perlu memiliki perspektif gender. Dengan begitu, perempuan dapat menerima informasi yang adil terkait akses sumber daya hutan.

Sejumlah program pendampingan yang telah dilakukan dari berbagai pihak di Kutai Barat, berupaya mengakomodir partisipasi perempuan. Informasi dari pendamping KBCF dan studi yang dilakukan, menemukan bahwa berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis, workshop dan sebagainya, telah melibatkan perempuan. Di dalam berbagai forum, metode yang dibawakan oleh narasumber sangat menentukan keaktifan peserta perempuan. Dalam hal ini, pengisi acara harus lebih dahulu aktif meminta peserta perempuan untuk berbicara maupun menuliskan pendapatnya.

Temuan yang diperoleh menunjukkan, penggalian informasi dengan metode yang tepat, dapat memunculkan ide/gagasan dari kelompok perempuan. Sehingga saat ini, secara umum tingkat partisipasi perempuan Kutai Barat dapat dikategorikan ke dalam kelompok **partisipasi konsultatif**.

Saat ini, di Kutai Barat terdapat beberapa kelompok usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang secara khusus digerakkan oleh perempuan. KUPS berbasis perempuan tersebut dibentuk melalui kegiatan pembentukan kelompok maupun restrukturisasi anggota. Meskipun memegang jabatan strategis merupakan upaya akselerasi partisipasi perempuan ke dalam kategori partisipasi interaktif, namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan pendampingan dan inovasi yang masif dari berbagai pihak untuk peningkatan kapasitas perempuan yang menunjang keberlanjutan KUPS tersebut.

Sebagai contoh, KUPS Eben Heizer yang berbasis perempuan di Kampung Intu Lingau, Kutai Barat, memiliki inovasi pangan pencegah stunting. Namun, dalam workshop yang diadakan

KBCF untuk menggalang dukungan Perhutanan Sosial bagi Perempuan dan Generasi Muda, disampaikan oleh ketua LPHD Baras Balaw, bahwa terdapat kendala berupa kurangnya dukungan pendanaan untuk menjalankan program serta anggota yang masih kurang partisipatif dalam kegiatan. Ketua KUPS Eben Heizer juga menyatakan kurangnya partisipasi aktif dari 10 anggota yang tercantum namanya dalam SK KUPS.

Sementara itu, studi yang dilakukan di Kampung Lakan Bilem, menarik **faktor-faktor utama** yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam mengelola Hutan Desa. **Pertama**, akses Hutan Desa yang jauh, sehingga frekuensi masyarakat untuk masuk ke dalam hutan sangat jarang. Dapat dikatakan, belum ada aktivitas/kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat di dalam Hutan Desa. Aktivitas di dalam hutan biasanya adalah berburu, mencari rotan, mencari madu, dan melakukan patroli rutin. Sementara di sekitar Hutan Desa, masyarakat melakukan aktivitas berkebun dan beternak.

Bagi perempuan kampung Lakan Bilem, terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan di sekitar Hutan Desa. Salah satunya yakni membuat bedak dingin khas masyarakat Dayak. Bedak dingin tersebut biasanya dimanfaatkan sebagian besar wanita di Kampung Lakan Bilem sebagai perawatan kulit wajah alami. Uniknya, bahan yang digunakan berasal dari tumbuhan yang berada di sekitar Hutan Desa, yakni kulit pohon belaband dan banggeris, serta tumbuhan atsiri sebagai bahan wewangian. Biasanya,

para perempuan tersebut mengambil sendiri bahan bedak dingin ke sekitar Hutan Desa. Aktivitas membuat bedak dingin merupakan bagian dari budaya khas perempuan Lakan Bilem. Meskipun demikian, terdapat tantangan bagi perempuan untuk mengakses manfaat dari Program Perhutanan Sosial. Menurut penuturan perempuan anggota LPHD Lakan Bilem, partisipasi perempuan dalam setiap program Perhutanan Sosial belum optimal. Sering kali, perempuan hanya tercatat namanya dalam Surat Keputusan, namun jarang diikutsertakan dalam kegiatan di dalamnya. Dengan demikian, faktor selanjutnya yang mempengaruhi partisipasi perempuan yakni, informasi terkait rapat, kegiatan dan sebagainya tidak tersebar secara merata.

c. Rekomendasi bagi pemangku kepentingan

Rekomendasi ditujukan sebagai bentuk respon terhadap minimnya peran perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa dan pembangunan desa serta tingginya angka ketimpangan gender, berikut rekomendasi yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan ketimpangan gender dalam pembangunan daerah:

Tabel 4. Rekomendasi Bagi Pemangku Kepentingan

Lembaga/Instansi	Rekomendasi
Dinas Komunikasi dan Informasi	Meningkatkan partisipasi warga baik laki-laki maupun perempuan dalam pengembangan lembaga informasi dan komunikasi masyarakat di tingkat desa yang bertujuan mendokumentasikan kegiatan pengelolaan sumber daya alam baik yang dilakukan oleh laki laki atau perempuan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Menyusunan alat evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender.
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan meningkatkan kapasitas melalui sosialisasi dan bimbingan teknis pengarusutamaan gender di tingkat desa.
Dinas Kesehatan	Mendorong percepatan Sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga (SP-PIRT Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Perempuan di tingkat desa.
Dinas Lingkungan Hidup	Pelibatan perempuan dalam setiap aktivitas pelestarian lingkungan hidup.
Dinas Ketahanan Pangan	Sosialisasi dan bimbingan teknis pembuatan produk olahan pangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Perempuan yang aman konsumsi. Dinas Ketahanan Pangan juga dapat mendorong pelatihan bagi kelompok

	perempuan dalam membuat produk pangan yang aman konsumsi.
Dinas Pertanian	Pelibatan perempuan dalam pengembangan kualitas dan mutu produk pertanian melalui sistem <i>good agriculture practice</i> (GAP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pelibatan perempuan dalam agenda manajemen dan tata kelola pengorganisasian lembaga masyarakat desa termasuk kelompok perempuan
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Peterlibatan perempuan dalam setiap proses pemberdayaan, penerbitan izin dan pemasaran produk UMKM terkhusus UKM Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
KPHP Damai	Pelibatan dan partisipasi aktif perempuan dalam setiap agenda pengelolaan hutan dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring evaluasi.
Pemerintah Kampung Lakan Bilem	Melibatkan secara aktif perempuan dalam pengelolaan hutan dan pembangunan desa melalui pelibatan dalam musyawarah kampung, pelatihan peningkatan kapasitas dan agenda pengembangan usaha berbasis kelompok masyarakat.
LPHD Lakan Bilem	Melibatkan partisipasi aktif perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa di Kampung Lakan Bilem baik melalui perencanaan kegiatan, pelaksanaan hingga proses monitoring dan evaluasi. LPHD juga dapat melibatkan perempuan secara aktif dan partisipatif dalam pengembangan usaha wisata dan produk pangan berbasis kearifan lokal desa.

V. KESIMPULAN

Sejumlah regulasi telah diterapkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam isu PS. Namun disadari, masih adanya ketimpangan gender meskipun laki-laki maupun perempuan sama-sama memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan. Tingkat partisipasi perempuan dalam pengelolaan Hutan Desa Kabupaten Kutai Barat masuk dalam kategori partisipasi konsultatif. Meski demikian, pengalaman perempuan perlu terus diakomodir hingga mencapai tingkat partisipasi aktif dan interaktif. Mengingat, banyak masyarakat termasuk perempuan yang menggantungkan hidupnya pada akses dan pengelolaan Hutan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, Bina. 2001. "Participatory Exclusions, Community Forestry, and Gender: An Analysis for South Asia and a Conceptual Framework". Dalam Jurnal World Development 29 (10).
- Buku Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Kemasyarakatan (2021). Dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Desmiwati. 2016. "Quo Vadis Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Kebijakan Publik di Sektor Kehutanan: Kasus Program Perhutanan Sosial di Indonesia". Dalam Jurnal Penelitian Ekosistem DIPTEROKARPA Volume 2 Nomor 2.
- Haryanto, Sugeng. 2008. Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggalek. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan. Volume 9 Nomor 1.
- <https://www.iucn.org/news/gender/202103/new-data-reveals-slow-progress-achieving-gender-equality-environmental-decision-making>
- Manalu, Abby Gina Boang. "Perempuan dan Perhutanan Sosial". Dalam Jurnal Perempuan, Volume 27 Nomor 1.
- Manembu, Angelia E. 2018. Peranan Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat Desa, Jurnal Ilmu Politik, Volume 7 Nomor 1.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial
- Saleh, M. 2014. Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 6. No. 2 (Musawa), 236–259.
- Sunderland, Terry, Ramadhani Achdiawan, Ronnie Babigumira, Amy Ickowitz, Fiona Paumgarten, Victoria Reyes-García, and Gerald Shively. 2014. "Challenging Perceptions about Men, Women, and Forest Product Use: A Global Comparative Study." World Development 64 (December): S56–66

Taroniarta Sukma & Nurul Huda Yahya. 2022. "Perempuan Pejuang Sutra di Kabupaten Wajo: Aktor Tunggal dan Tantangan Akses Program Perhutanan Sosial". Dalam Jurnal Perempuan, Volume 27 Nomor 1.

LAMPIRAN

Kuesioner Penelitian

Identitas Informan:

Nama:

Jenis Kelamin:

Usia:

Pekerjaan:

Pendidikan terakhir:

Jabatan di LPHD/KUPS:

No. HP:

Panduan Wawancara Mendalam

1. Apakah kegiatan sosialisasi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial telah mengikutsertakan perempuan?

Jika iya, bagaimana bentuk dan proses keterlibatan kelompok perempuan dalam kegiatan tersebut? Serta apa manfaat yang didapatkan dari keterlibatan tersebut?

Apakah materi sosialisasi yang diberikan sudah mendorong adanya pengarusutamaan Gender?

Jika tidak ada keterlibatan perempuan, mengapa?

2. Apakah pada kegiatan fasilitasi dan bimbingan teknis dalam penandaan batas pada ruang kelola Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial telah melibatkan perempuan? Bagaimana proses pelibatan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan dan penandaan batas areal/zonasi Persetujuan Pengelolaan PS? Apakah perempuan hanya ada pada saat rapat atau ikut hadir ke lapangan?

Bagaimana peran perempuan dalam kegiatan tersebut?

Jika tidak ada keterlibatan perempuan, mengapa?

3. Apakah dalam proses identifikasi dan pendataan potensi areal Perhutanan Sosial telah melibatkan perempuan?

Jika iya, bagaimana peran kelompok perempuan?

Jika tidak ada keterlibatan perempuan, mengapa?

4. Apakah perempuan sudah dilibatkan dalam penyusunan RKPS dan RKT?
Bagaimana proses pelibatan dan peran perempuan dalam kegiatan tersebut?
Termasuk mengecek apakah dokumen RKPS dan RKT sudah mengintegrasikan perspektif gender (data pilah, analisis gender, dan lain-lain)?
Jika tidak ada keterlibatan perempuan, mengapa?
5. Apakah RKPS telah memuat berbagai rencana konservasi, produksi, dan peningkatan kapasitas (seperti pelatihan) yang melibatkan perempuan?
Jika iya, mohon dijabarkan kegiatan apa saja yang direncanakan dan melibatkan kelompok perempuan?
Jika tidak ada keterlibatan perempuan, mengapa?
6. Apakah dalam proses pembentukan KUPS telah mengundang dan melibatkan kelompok perempuan?
Jika iya mohon diceritakan bagaimana proses yang dilakukan dalam pembentukan KUPS tersebut?
Bagaimana keterlibatan perempuan dalam pembentukan KUPS?
Jika tidak ada keterlibatan perempuan, mengapa?
7. Apakah kelompok perempuan difasilitasi kerja sama dalam upaya peningkatan kapasitas SDM, KPS dan KUPS?
Bagaimana proses fasilitasi dan manfaat yang didapatkan?
Jika tidak ada keterlibatan perempuan, mengapa?
8. Apakah kelompok perempuan didampingi untuk mendapatkan akses permodalan dan pemanfaatan modal usaha?
Bagaimana bentuk pendampingannya?
Jika tidak ada keterlibatan perempuan, mengapa?
9. Apakah KUPS perempuan difasilitasi dalam membangun jejaring untuk mendapatkan akses pasar, termasuk peningkatan kapasitas pengembangan pemasarannya?
Bisa diceritakan proses fasilitasinya?
Jika tidak ada keterlibatan perempuan, mengapa?
10. Apakah dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi program perhutanan sosial juga mempertimbangkan perspektif gender (misalnya monitoring atas keterlibatan perempuan dalam kegiatan PS, data terpilah berdasarkan jenis kelamin, dan sebagainya)?
Pelibatan yang seperti apa? Partisipasi aktif, kehadiran saja, atau sampai mana?
Jika tidak ada keterlibatan perempuan, mengapa?